

**RENJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**RENJA
Tahun Anggaran 2025**

**DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

JL. KAPT. PIERRE TENDEAN – KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 ini mengacu pada Renja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025, yang mana Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 adalah merupakan salah satu unsur teknis Penunjang Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat di bidang Sosial, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung Barat melalui Sekretaris Daerah.

Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun 2025 ini merupakan perwujudan komitmen penyelenggaraan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (Good Governance) serta untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan Pembangunan dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta aspirasi masyarakat, dari aspirasi masyarakat maka diharapkan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadikan perencanaan pembangunan yang partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen masyarakat, sehingga penyelenggaraan pembangunan dalam bentuk Otonomi Daerah dapat mempunyai keleluasan dan kesempatan serta kemandirian dalam menggali segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk digunakan sebagai sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan Rencana Kerja ini.

Kuala Tungkal, 20 Desember 2024



REFIYENDRI S. Sos. I
Pembina Tk. I
NIP. 19670611 198802 1 003

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 4 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023 DAN PREDIKSI TAHUN 2024 | 7 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 | 7 |
| 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Sosial | 9 |
| 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial..... | 9 |
| 2.4 Review Terhadap Awal RKPD | 9 |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat | 10 |
| | |
| BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN | 23 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional | 23 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung barat | 23 |
| 3.3 Program dan kegiatan | 25 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 30 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sepenuhnya akan mendukung Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam menangani berbagai permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta Bagian Sekretariat. Dalam menjalankan peran strategisnya ini OPD berpedoman kepada Rencana Strategis.

Dalam pelaksanaannya Renstra OPD dijabarkan ke dalam Renja yang merupakan rencana kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja-OPD disusun berpedoman pada RPJMD, dan Renstra OPD dalam hal ini adalah RPJMD tahun (2021-2026) sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih

Kegiatan-kegiatan pada Renja OPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra OPD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sosial mengemban tugas dan tanggung jawab Permasalahan Sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat teratasi

Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2025, yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Renja Dinas Sosial merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyusunan Renja OPD mengacu kepada RKPD yang telah dibuat, dimana dalam hal ini substansi RKPD memuat program dan kegiatan OPD dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Renja OPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara parallel dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunan Renja OPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rancangan Awal Renja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 61).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur bidang Sosial yang akan dilaksanakan selama satu tahun kedepan yaitu :

1. Memberikan gambaran PMKS yang ada di Tanjung Jabung Barat
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai titik awal dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2024 adalah untuk memberikan arah rencana Kegiatan untuk satu Tahun kedepan, sehingga pelaksanaan pembangunan bersinergis antara sektor dan sub sektor lainnya, guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah maka tujuan Ranwal Renja ini adalah :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Memberikan pedoman, alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Tahun 2025
3. Sebagai paduan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika

Sistematika Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 disusun sebagai Berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2023 DAN PREDIKSI TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL
TAHUN 2023 DAN PREDIKSI TAHUN 2024**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 berjalan sesuai yang diharapkan yang kesemuanya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara maksimal bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu terhadap Realisasi Renstra SKPD dapat digambarkan pada penjelasan dibawah ini, dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun 2023 Sebagai Berikut :

**Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun Anggaran 2023**

| | Program/Kegiatan | Jumlah Dana | Realisasi | Keu % | Fisik % |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 3,731,346,042 | 1,038,912,642 | 93 | 93 |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 113,037,650 | 104,858,785 | 92.76 | 99.38 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 113,037,650 | 104,858,785 | 92.76 | 99.38 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,617,823,194 | 2,417,038,721 | 92,33 | 100 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,518,533,194 | 2,322,748,721 | 92,23 | 100 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 99,290,000 | 94,290,000 | 94,96 | 100 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 46,647,000 | 46,601,500 | 99.90 | 100 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 46,647,000 | 46,601,500 | 99.90 | 100 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 466,133,893 | 439,739,000 | 94,34 | 100 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2,878,787 | 2,878,450 | 99.99 | 100 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 64,874,106 | 61,343,550 | 94.56 | 95.61 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 19,700,000 | 3,500,000 | 17.77 | 17.77 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 36,893,000 | 32,785,000 | 88.87 | 88.82 |

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 6,300,000 | 4,085,000 | 64.84 | 100 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 335,488,000 | 335,147,000 | 99.9 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 114,690,000 | 96.173.299 | 83,85 | 83,85 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4,290,000 | 4,270,000 | 99.53 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 45,600,000 | 27,103,299 | 59.44 | 100 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 64,800,000 | 64,800,000 | 100 | 100 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 373,014,305 | 209.403.646 | 56,14 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 134,649,325 | 111,541,412 | 82.84 | 90.17 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 28,900,000 | 26,995,000 | 93.41 | 100 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 209,464,980 | 209,403,646 | 99.97 | 100 |
| | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | 163,482,788 | 122.574.725 | 74,98 | 99 |
| | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 16,642,210 | 16,642,210 | 100 | 100 |
| | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 16,642,210 | 16,642,210 | 100 | 100 |
| | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 146,840,578 | 105.932.515 | 72,14 | 99 |
| | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 72,626,225 | 70,647,250 | 97.28 | 100 |
| | Pemberian Layanan Rujukan | 72,439,353 | 33,510,265 | 46.26 | 96.82 |
| | Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 1,775,000 | 1,775,000 | 100 | 100 |
| | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | 4,018,754,331 | 3,763,176,974 | 93,64 | 100 |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 4,018,754,331 | 3,763,176,974 | 93,64 | 100 |
| | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 169,994,124 | 166,148,610 | 98.06 | 98.74 |
| | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | 169,443,610 | 146,794,124 | 86.35 | 99.82 |
| | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | 3,679,316,597 | 3,450,234,240 | 93.77 | 99.94 |
| | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 120,324,450 | 113,361,850 | 94.21 | 99.00 |
| | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | 120,324,450 | 113,361,850 | 94.21 | 99.00 |
| | Penyediaan Makanan | 120,324,450 | 113,361,850 | 94.21 | 99.00 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 52,839,196 | 50,589,196 | 95.74 | 100 |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 52,839,196 | 50,589,196 | 95.74 | 100 |
| | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | 52,839,196 | 50,589,196 | 95.74 | 100 |
| | TOTAL DANA | 8,086,746,807 | 7,502,054,108 | 92,77 | 98,20 |

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian Kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2022 secara keseluruhan sudah mencapai target fisik sebesar 98,20 % dengan daya serap keuangan sebesar Rp.1.670.319.648,- atau 92,77%.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL

Bidang Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam hal Kesejahteraan Sosial dan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kewenangan otonomi daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti Memberikan Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Pelayanan Psikososial bagi PMKS ditrauma centre termasuk bagi Korban Bencana, Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS, Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dan Napak Tilas serta potensi pemanfaatannya secara luas.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki multi permasalahan Sosial yakni adanya 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) serta berbagai macam bencana alam dan Sosial yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan harus segera mendapatkan penanganan sebagai wujud perhatian pemerintah daerah untuk itu perlu dukungan dana dari Pemerintah Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Dari Renja yang telah disusun pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator Kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Sosia Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di samping itu, dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mendukung arah kebijakan, telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan. Adapun rencana program dimaksud sudah dituangkan dalam rancangan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun dalam pelaksanaannya didukung pula dengan beberapa program dan Kegiatan yang sesuai dengan permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050 Tahun 2020

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan dalam unit kerja, dalam hal ini Dinas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa Program yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2024 yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Lainnya
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/ Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

9. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu
 - Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Layanan Kedaruratan

10. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

11. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar

12. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga

13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan

- Penyediaan Sandang
14. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
15. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Tabel : 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial
Dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2020
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) | Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan | |
|---|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | Target Renja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Th. 2018) | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 6/5 | 8 | 9 = (4 +6+8) | 10=9/4 |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Tercapainya Pelayanan administrasi perkantoran | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,36% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya jasa surat menyurat | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,79% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | Terpenuhinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,26% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Terlaksanya kegiatan pelayanan administrasi keuangan | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 96,11% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | tersedianya jasa kebersihan kantor | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,93% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | tersedianya alat tulis kantor | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 98,02% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) | Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 20 | Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan | |
|--|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | Target Renja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= 6/5 | 8 | 9 = (4 +6+8) | 10=9/3 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 95,30% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,39% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya media cetak/elektronik | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Makanan dan Minuman | Terpenuhinya/tersedianya makan dan minum rapat | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,95% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Penyediaan Media Cetak/Elektronik | tersedianya media cetak dan elektronik dan iklan layanan | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 98,75% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Sarana dan Prasarana Aparatur | 100% | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 95,57% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Pembangunan Gedung Kantor | Tersedianya Gedung aula/Kantor | 1 Paket | - | - | - | - | | - | |
| Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor | terlaksananya pengawasann pembangunan gedung kantor | 1 Paket | - | - | - | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) | Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | Target Renja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
| Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor | terlaksananya perencanaan pembangunan gedung kantor | 1 Paket | - | - | - | - | - | - | |
| Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor | Meningkatnya sarana dan prasarana dan prasarana aparatur | 1 Paket | - | - | - | - | - | - | |
| Perencanaan Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor | Terlaksananya perencanaan pengecoran rabat beton halaman kantor | 1 Dokumen | - | - | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | |
| Pengawasan Pengecoran Rabat beton Halaman Kantor | Terlaksananya pengawasan pengecoran rabat beton halaman kantor | 1 Paket | - | - | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional | tersedianya kendaraan dinas operasional | 9 Unit | - | - | - | 3 unit | 3 Unit | 33% | |
| Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan gedung kantor | 50 Unit | - | 15 Unit | 15 Unit | 100% | 15 Unit | 110 Unit | 73% |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor | Tersedianya perlengkapan gedung kantor | 50 | - | 10 Unit | 10 Unit | 100% | 10 Unit | 30 Inis | 73% |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Gedung Kantor | 100% | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) | Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan | |
|---|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | Target Renja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Terpeliharanya kendaraan dinas dan operaional dinas | 100% | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 90,01% | 12 Bulan | 36 bulan | 60 % |
| Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor | terpeliharanya peralatan geung kantor | 100% | - | 12 bulan | 12 bulan | 92,49% | 12 bulan | 36 bulan | 60 % |
| Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor | 100% | - | 3 Bulan | 3 Bulan | 100% | 3 Bulan | 36 bulan | 60 % |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya disiplin dan Kinerja aparatur | 100% | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 bulan | 60 % |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya | 100% | - | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 Bulan | 36 bulan | 60 % |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan PNS | 10 Orang | - | | | | | | |
| Pengembangan SDM | Meningkatnya Pengetahuan dan kinerja aparatur | 8 Orang | - | 6 orang | 6 orang | 96,38 | 6 orang | 6 orang | 25% |
| Pendidikan dan Pelatihan Formal | Meningkatnya kapasitas dan Sumber Daya Aparatur | 32 Orang | - | 6 Orang | 6 Orang | 96,38 | 6 Orang | 6 orang | 25 % |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) | Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan | |
|---|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | | | | Target Renja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020) | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Meningkatnya sistem manajemen pelaporan kinerja dan Keuangan | 100% | - | | | | | | |
| Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | Tersedianya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja | 25 Dokumen | 5 | 5 | 5 | 100% | 5 | 15 | 60 % |
| Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Persentase PMKS yang menerima bantuan | 80% | | | | | | | |
| Pendataan dan Pelaporan PMKS | Tersedianya data dan Profil PMKS | 4 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 25% |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) | Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2016 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2018 | Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan | |
|---|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | Target Renja Tahun 2018 | Realisasi Renja Tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
| Pendataan fasilitas UEP bagi keluarga miskin | tersedianya data UEP Keluarga Miskin yang berham mendapat bantuan | 28 Dokumen | - | 7 Kec | 7 Kec | 77,50 | 7 | 7 | 25% |
| Penyuluhan Bahaya Narkoba berbasis Sekolah | Pelajar mengetahui Bahaya Penyalahgunaan Narkoba | 100 Siswa | | 2 Kec | 2 Kec | 92,70 | 100 Siswa | 100 Siswa | 25 % |
| Pembinaan dan Monitoring Bansos Rastra dan BPNT | Pendistribusian/Penyaluran Bansos Rastra sampai tujuan dan tepat sasaran | 52 Kec | - | | | | | | |
| Kesiapsiagaan Bencana dan Pemeliharaan Bufferstock Barang Bencana | Korban Bencana yang mendapatkan bantuan | 75 Kali Kejadian Bencana | | | - | 99,26 | | 15 | 40% |
| Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan | Meningkatnya peran PKH dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat | 20.000 KPM | | 13 Kec | 13 Kec | 96,48 | 6090 KPM | 6090 KPM | 30,45% |
| Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang aktif | 80% | - | | | | | | |
| optimalisasi peran dan fungsi Karang taruna | Meningkatnya kemampuan manajemen Karang taruna | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA) | Realisasi Target Kinerja Hasil Keluaran Kegiatan s/d 2020 | Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan Kegiatan Tahun 2020 | Perkiraan Realisasi Capaian Renstra s/d Tahun Berjalan | |
|--|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | Target Renja Tahun 2020 | Realisasi Renja Tahun 2020 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan | Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) |
| Penguatan Kelembagaan Komisi Daerah Lanjut Usia | Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Lansia | 65 Kec | - | 13 Kec | 13 Kec- | 83,27% | 13 Kec | 26 Kec | 40% |
| Evaluasi dan Monitoring Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial | Terlaksananya pemantauan bantuan pemberdayaan social | 52 Kec | - | | | | - | 13 kec | 25 % |
| Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan | Terpeliharanya TMP Yudha Satria dengan baik | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 99,57% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Peningkatan Peranan Kapasitas Kerja Legun Veteran RI | Meningkatnya kinerja legiium Veteran di Tanjab Barat | 60 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 67,22% | 12 Bulan | 36 Bulan | 60% |
| Peningkatan Nilai-Nilai Kejuangan | Terlaksananya Kegiatan Upacara Hari Pahlawan | 5 Kali Kegiatan | 1 kali kegiatan | 1 Kali | 1 Kali | 99,82% | 1 Kali | 2 Kali | 60% |
| Verifikasi dan validasi data Terpadu Penanganan Fakir Miskin | Terlaksananya verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin | 4 Kali Kegiatan | -- | 1 Kali Kegiatn | 1 Kali egiatan | 99,98% | - | 1 Kali Kegiatan | 25% |
| Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Persentase Jumlah PMKS | 8% | - | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|------|
| Santunan Pemulangan Tuna Sosial | Terlaksananya santunan, pengobatan dan pemulangan tuna sosial | 205 orang | 20 org | 35 Org | 35 Org | 70,98 | 40 Org | 40 Org | 46 % |
| Operasi Terpadu Tuna Sosial | Masyarakat pedili dan ikut serta dalam pencegahan dan penangan tuna susila, gepeng dan anak jalanan | 45 Org | - | | | | - | - | |
| Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma | | 35% | - | | | | | | |
| Pembuatan aksesibilitas bagi difabel/ penyandang cacat | Terbangunnya aksesibilitas bagi difabel/penyandang cacat | 100% | - | | | | - | 1 Paket | 100% |

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tela'ah Terhadap Kebijakan Nasional

Terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berpijak pada kebijakan nasional dalam melaksanakan program dan kegiatan merupakan satu kesatuan dalam membantu tercapainya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dimana semua program dan kegiatan yang dilaksanakan diharapkan sepenuhnya bisa mendukung program pemerintah pusat.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah dan merupakan integrasi antara sumber daya manusia dan sumber daya alam agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Dalam upaya mewujudkan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2025 yaitu :

“ MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH “

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu tahun kedepan dengan diformulasikannya tujuan ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, lebih dari itu perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi, konsultasi, pengawasan dan pelayanan secara umum kepada para pemangku kepentingan;
2. Menciptakan pola pikir aparatur sesuai jabatannya dengan tupoksi dibidangnya;
3. Membentuk aparatur yang berkinerja tinggi sesuai kebutuhan masyarakat;
4. melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan baik secara vertical maupun horizontal.

Tujuan ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Tujuan dari organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah menerapkan prinsip Good Governance dilingkungan Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peningkatan pelayanan yang mendasar harus diperbaiki, agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan menumbuhkan sikap akuntabel, maka harus ditunjang dengan sistem administrasi dan pemerintahan yang baik, sarana dan prasarana yang cukup, wawasan serta pengetahuan aparat yang luas serta regulasi peraturan yang mampu mempercepat pembangunan. Pada akhirnya keseluruhan tujuan dari organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada satu tahun kedepan dapat tercapai.

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun dan dijabarkan dalam lima periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja tahunan. Sasaran yang ditetapkan harus terukur untuk itu sasaran harus dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dengan angka atau persentase yang terukur. Adapun sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Terciptanya tertib administrasi pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan keuangan yang efektif dan efisien;
2. Terpenuhinya SDM untuk tenaga administrasi/teknis perkantoran;
3. Terpenuhinya Sarana Prasarana Perkantoran;
4. Tersedianya Sumber daya aparatur yang mampu bekerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Tersusunnya laporan pelaksanaan capaian kinerja dan keuangan;
6. Terwujudnya tertib administrasi manajemen Asset Daerah;
7. Melaksanakan pemerataan pelayanan disemua kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menyesuaikan program kegiatan
8. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah sosial.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

- 3.3.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 3.3.2 Program Pemberdayaan Sosial
- 3.3.3 Program Rehabilitasi Sosial
- 3.3.4 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

3.3.5 Program Penanganan Bencana

3.3.6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2024 yaitu :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Penyediaan bahan material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PRGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 mempunyai beberapa program sebagaimana termuat dalam RPJMD diantaranya :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Untuk menunjang program-program diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun beberapa rencana kegiatan/sub kegiatan untuk Tahun 2025 yaitu :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Penyediaan bahan material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Sandang
 - Penyediaan Alat Bantu Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spritual dan sosial
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - Pemberian Layanan Kedaruratan
2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - Pemberian Layanan Rujukan
 - Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - Rujukan Anak-Anak Terlantar
2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan Sandang
2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

PRGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kab/Kota

Selanjutnya Rencana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Tabel : 4 terlampir :

Tabel 4
Rancangan Awal Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (out come) dan Kegiatan (out put) | Rencana Tahun 2025 | | | | Catatan Penting | Perkiraan Maju Tahun 2026 | |
|--------|---------|-------------------|------------------|---|---|--|--------------------|--------------------|---------------|-------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| | | | | | | | Lokasi | Target | Rp | Sumber Dana | | Target | Rp |
| | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | 1 | | | Nilai AKIP Perangkat Daerah Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase tindak lanjut hasil temuan Inspektorat | | 69 81 100% | | | | 69 82 100% | |
| | | | | URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | |
| | | | 1.06.00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | | | 7.313.125.534 | | | | 16.225.124.324 |
| | | | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB KOTA | | Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor | | 100% | 4.486.562.240 | | | 100% | 7.140.124.324 |
| | | | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | | Tersedianya Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja | | 6 Laporan | 67.198.000 | | | 6 Laporan | 150.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dinsos | 6 Laporan | 49.180.000 | DAU | | 6 Laporan | 100.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dinsos | 3 Laporan | 18.018.000 | DAU | | 3 laporan | 50.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Laporan Keuangan Tahunan OPD | | 12 bulan | 2.929.836.070 | | | 12 bulan | 3.140.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.02.01 | Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Dinsos | 20 orang/ 12 bulan | 2.752.362.070 | DAU | | 20 orang/ 12 bulan | 3.000.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Dinsos | 1 Dokumen | 156.720.000 | DAU | | 1 Dokumen | 120.000.000 |
| | | | 1.06.01.02.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dinsos | 12 Laporan | 20.754.000 | DAU | | 12 Laporan | 20.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Tingkat Kehadiran Pegawai | | 75 Paket | 56.400.000 | | | 75 Paket | 216.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.05.02 | pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Dinsos | 75 Paket | 56.400.000 | DAU | | 75 Paket | 36.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Dinsos | 10 orang | 0 | DAU | | 10 orang | 150.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.05.11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Dinsos | 6 orang | 0 | DAU | | 6 orang | 30.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Cakupan Layanan Administrasi Umum | | 100% | 693.948.170 | | | 100% | 1.190.500.000 |
| | | | 1.06.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Dinsos | 10 Paket | 9.280.000 | DAU | | 10 Paket | 4.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Dinsos | 10 Paket | 64.173.000 | DAU | | 10 Paket | 120.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Dinsos | 2 Paket | 15.688.370 | DAU | | 2 Paket | 24.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.06.05 | Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Dinsos | 4 Paket | 79.606.800 | DAU | | 4 Paket | 35.000.000 |
| | | | 1.06.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dinsos | 12 Dokumen | 7.500.000 | DAU | | 12 Dokumen | 7.500.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---|--------|----------------|--------------------|-----|--|----------------|----------------------|
| | | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Dinsos | 10 Paket | 0 | DAU | | 10 Paket | 200.000.000 |
| 1.06.01.2.06.09 | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Dinsos | 200 Laporan | 517.700.000 | DAU | | 200 Laporan | 800.000.000 |
| 1.06.01.2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 354.872.000 | | | 100% | 152.000.000 |
| 1.06.01.2.08.01 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Dinsos | 12 Laporan | 4.880.000 | DAU | | 12 Laporan | 2.000.000 |
| 1.06.01.2.08.02 | | Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Dinsos | 24 Laporan | 65.592.000 | DAU | | 24 Laporan | 50.000.000 |
| 1.06.01.2.08.04 | | Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Dinsos | 8 Laporan | 284.400.000 | DAU | | 8 Laporan | 100.000.000 |
| 1.06.01.2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD | | 92 Unit | 148.832.000 | | | 92 Unit | 1.884.624.324 |
| 1.06.01.2.07.01 | | Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Jabatan | Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Dinsos | 17 Unit | 76.500.000 | DAU | | 17 Unit | 700.000.000 |
| 1.06.01.2.07.02 | | Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Dinsos | 2 unit | 72.332.000 | DAU | | 2 unit | 84.963.000 |
| 1.06.01.2.07.05 | | Pengadaan Mebel | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Dinsos | - | - | DAU | | 6 unit | 100.000.000 |
| 1.06.01.2.07.06 | | Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya | Tersedianya Mebel | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Dinsos | 71 unit | - | DAU | | 71 unit | 799.661.324 |
| | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Dinsos | 2 unit | - | DAU | | 2 unit | 200.000.000 |
| 1.06.01.2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 64 Unit | 235.476.000 | | | 64 Unit | 407.000.000 |
| 1.06.01.2.09.02 | | Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Dinsos | 17 Unit | 196.536.000 | DAU | | 17 Unit | 180.000.000 |
| 1.06.01.2.09.06 | | Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Dinsos | 47 unit | 24.530.000 | DAU | | 47 unit | 27.000.000 |
| 1.06.01.2.09.09 | | Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Dinsos | 4 Unit | 14.410.000 | DAU | | 4 Unit | 200.000.000 |
| | | 02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PSKS yang trampil | | 87% | - | | | 89% | 1.067.000.000 |
| | | 02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota | Jumlah PSKS yang trampil dan memadai dalam memberikan pelayanan | | 49 org | - | | | 50 orang | 1.067.000.000 |
| | | 02.2.03.01 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota | Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 25 org | - | DAU | | 26 org | 150.000.000 |
| | | 02.2.03.02 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 13 org | - | DAU | | 13 org | 89.000.000 |
| | | 02.2.03.04 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 27 Keluarga | - | DAU | | 27 Keluarga | 50.000.000 |
| | | 02.2.03.05 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 5 Lembaga | - | DAU | | 5 Lembaga | 700.000.000 |

Meningkatnya ketentrangan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat

Meningkatnya jumlah peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---|---|--|--------|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|-------------|
| | | 02.2.03.05 | Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 11 Sertifikat | - | DAU | | 11 Sertifikat | 78.000.000 | |
| | | 04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | | persentase PPKS yang diberi bantuan | | 58,37% | 1.910.206.336 | | | 79,18% | 3.098.000.000 | |
| Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gelandangan dan pengemis | Persentase Penduduk Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis diluar panti | 04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis di luar Panti Sosial | | jumlah ppks yang diberi bantuan | | 58,37% | 1.813.159.336 | | | 79,18% | 2.300.000.000 | |
| | | 04.2.01.01 | Penyediaan Permakanan | Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 100 org | 1.715.459.336 | DAU | | 100 org | 200.000.000 | |
| | | | Penyediaan Sandang | Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 100 orang | 97.700.000 | DAU | | 100 orang | 200.000.000 | |
| | | 04.2.01.03 | Penyediaan Alat Bantu | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 60 org | - | DAU | | 60 org | 800.000.000 | |
| | | 04.2.01.05 | Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spritual dan sosial | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 100 orang | - | DAU | | 100 orang | 50.000.000 | |
| | | 04.2.01.06 | Pembeian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 50 orang | - | DAU | | 50 orang | 200.000.000 | |
| | | | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 100 org | - | DAU | | 100 org | 250.000.000 | |
| | | 04.2.01.10 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 100 orang | - | DAU | | 100 orang | 600.000.000 | |
| | | 04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | | jumlah PPKS yang ditangani | | | 58,37% | 97.047.000 | | | 79,18% | 798.000.000 |
| | | 04.2.02.01 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 19.400 orang | - | DAU | | 19.400 orang | 98.000.000 | |
| | | 04.2.02.13 | Pemberian Layanan Rujukan | Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 120 org | 97.047.000 | DAU | | 120 org | 600.000.000 | |
| | | 04.2.02.14 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota | 13 Kec | 13 Dokumen | 0 | DAU | | 13 Dokumen | 100.000.000 | |
| | | 05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | | Persentase PPKS yang dilayani | | 76,26% | 437.913.200 | | | 87,71% | 1.105.000.000 | |
| Meningkatnya kesejahteraan PPKS | Persentase PPKS yang dilayani | 05.2.01 | Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar | | jumlah anak terlantar yang dilayani | | 76,26% | - | | | 70 orang | 200.000.000 | |
| | | 05.2.01.01 | Penjangkauan Anak-Anak Terlantar | Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 60 orang | - | DAU | | 60 orang | 170.000.000 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|-----------|-----------------|----------------------|-----|--|-----------------|-----------------------|
| 05.2.01.02 | Rujukan Anak-Anak Terlantar | Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 10 orang | - | DAU | | 10 orang | 30.000.000 |
| 05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | | Persentase Cakupan Data Keluarga Miskin | | 96,63% | 437.913.200 | | | 98,32% | 905.000.000 |
| 05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | 13 Kec | 10.000 orang | 331.552.800 | DAU | | 10.000 orang | 500.000.000 |
| 05.2.02.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | 13 Kec | 10.550 Keluarga | 106.360.400 | DAU | | 10.550 Keluarga | 155.000.000 |
| | Fasilitasi Bantuan sosial Kesejahteraan Keluarga | Terpenuhinya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 100 Keluarga | - | DAU | | 100 Keluarga | 250.000.000 |
| 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | | Persentase Korban bencana yang mendapat bantuan | | 100% | 423.381.758 | | | 100% | 715.000.000 |
| 06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota | | Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan | | 100% | 345.861.758 | | | 50 KK | 500.000.000 |
| 06.2.01.01 | Penyediaan Makanan | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 500 Orang | 324.311.758 | DAU | | 500 Orang | 250.000.000 |
| 06.2.01.02 | Penyediaan Sandang | Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 500 Orang | 21.550.000 | DAU | | 500 Orang | 250.000.000 |
| 06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten Kota | | Jumlah tagana yang dibina | | 100% | 77.520.000 | | | 100% | 215.000.000 |
| 06.2.02.01 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana | Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 2 Kampung | - | DAU | | 2 Kampung | 65.000.000 |
| 06.2.02.02 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 13 Kec | 73 orang | 77.520.000 | DAU | | 73 orang | 150.000.000 |
| 07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | | Persentase taman makam pahlawan dalam kondisi baik | | 86% | 55.062.000 | | | 94% | 3.100.000.000 |
| 07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten | | Taman Makam Pahlawan yang dipelihara | | 86% | 55.062.000 | | | 94% | 3.100.000.000 |
| 1.6.7.201.1 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pembengis | 1 Dokumen | - | DAU | | 1 Dokumen | 3.000.000.000 |
| 1.6.7.201.2 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | Pembengis | 43 Makam | 43.062.000 | DAU | | 43 Makam | 70.000.000 |
| 1.6.7.201.3 | Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Pembengis | 1 Laporan | 12.000.000 | DAU | | 1 Laporan | 30.000.000 |
| | | | | | | 7.313.125.534 | | | | 16.225.124.324 |

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan Bidang Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang harus diwujudkan. Selain hal tersebut diatas, juga mempertimbangkan bahwa terwujudnya aparatur yang professional, bermoral etika, akuntabel dan sejahtera yang mampu memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat dan aparatur yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana agenda reformasi birokrasi pada periode pembangunan aparatur yang belum dituntaskan.

Kuala Tungkal, 20 Desember 2024


REFIYENDRI S. Sos. I
Pembina Tk.I
NIP. 19670611 198802 1 003